

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA
RANCAPANGGUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Paisal Nopiansyah¹, Agustina Setiawan², Dadan Kurnia³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung. Serta, menyangkut rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mempelajari mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi, observasi lapangan, dan wawancara. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tokoh Masyarakat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di bidang Pembangunan Ekonomi Desa masih belum Optimal. Ada beberapa titik kelemahan seperti (1) kurangnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat, (2) kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung, (3) kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat, (4) kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Ekonomi Desa

Abstract

This research entitled "The role of Village Government in Increasing Public Participation in Economic Development Village Rancapanggung Cililin District West Bandung Regency". The problem in this research is not optimal the Village Head in monitoring the development of society so that it can cause the lack of society in participating in planning, execution, utilization and also supervision and evaluation of economic development in Rancapanggung Village. As well as, concerning the low level of public awareness and lack of socialization of agencies that will carry out development activities to the community resulting in lack of ownership of the results of development and lack of coordination between agencies. The purpose of this study is to describe and analyze the Role of Village Government in Increasing Public Participation in Village Economic Development. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques conducted by researchers is to learn to study books as reference materials, field observations, and interviews. In sampling the researcher using technique Purposive Sampling. Informants in this research are Village Head, Village Community Empowerment Institution, and Community Leader. From the research results found that the role of village government in improving community participation in the field of village economic development is still not optimal. There are several weak points such as (1) lack of village heads in monitoring the development of the community, (2) lack of community in participating in planning, implementation, utilization and monitoring and evaluation of economic development in Rancapanggung Village, (3) lack of socialization from agencies that will carry out development activities to the community, (4) lack of ownership of the development result and lack of coordination between agencies.

Keywords: Role of Village Government, Community Participation, Development, Village Economy

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi

lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan ekonomi desa.

Menurut Bhattacharyya (dalam Ndraha, 1990) partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto (dalam Ndraha, 1990) juga menyatakan bahwa partisipasi sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Sementara itu, (Wahyudi, 1999) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya. Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat, yaitu partisipas dalam pemilihan, partisipasi kelompok, kontak antara warga negara dengan pemerintah, dan partisipasi warga negara langsung.

Dalam hubungannya dengan palaku-pelaku yang terlibat dalam aktifitas pembangunan, Nelson (dalam Tanggkilisan, 2005) menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi, yaitu: (1). Partisipasi Horizontal yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan; (2). Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat

berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, maka perlu adanya kerja nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal pembangunan, terutama dibidang pembangunan ekonomi desa. Disamping itu kerja sama oleh perangkat desa dengan masyarakat juga diperlukan. Karena itulah pemerintah desa harus berperan secara maksimal dalam meningkatkan pemabangunan di bidang pembangunan ekonomi desa di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Menurut (Soekanto, 2003) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup.

Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Apabila melihat kenyataan yang ada, pelaksanaan pembangunan ekonomi desa yang terdapat pada tingkat desa masih tertinggal. Tidak sesuai dengan peran dan fungsi dari desa yang banyak memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada diperkotaan. Disisi lain, dana dan program yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa juga tersedia. Adapun

beberapa program kegiatan pemerintah Desa Rancapanggung di bidang peningkatan ekonomi Desa Rancapanggung.

Desa Rancapanggung merupakan desa yang berada di kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat. Di lihat dari profil desa dan kelurahan, Desa Rancapanggung adalah Desa yang memiliki lahan pertanian, peternakan dan perkebunan yang cukup luas. Potensi mata pencaharian utama di desa rancapanggung adalah dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Bidang pekerjaan yang ada inilah yang menentukan struktur perekonomiannya. Dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Desa Rancapanggung masih sangat bergantung pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan sebagai bidang utama pekerjaan penduduk. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi ini harus dapat menampung kemungkinan-kemungkinan pergerakan peralihan bidang kerja penduduk dari satu bidang kebidang lain, khususnya yang mengarah pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan agar dapat menyokong upaya mewujudkan struktur ekonomi industri dengan pondasi pertanian, perikanan dan peternakan.

Dari hasil temuan dan pengamatan peneliti di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan program maupun kegiatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu: pertama, peran Kepala Desa belum Optimal dalam merencanakan maupun melaksanakan program peningkatan infrastruktur perekonomian desa dan peningkatan pembangunan ekonomi. Kedua, potensi sumber daya manusia yang masih rendah sehingga perlu dikembangkan kembali, sehingga menghambat pembangunan dalam setiap kegiatan desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sulitnya menumbuhkan sikap kemandirian di dalam masyarakat serta ketidakpercayaan masyarakat dengan Pemerintah Desa, sehingga keselarasan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa kurang terjalin dengan baik.

Melihat hal tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat di bidang Pembangunan Ekonomi di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sukmadinata, 2009), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan difokuskan di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, Tokoh masyarakat di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi Desa

Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dijabarkan lebih rinci dengan fokus yaitu pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, dan pengembangan terhadap masyarakat.

a. Pembinaan Terhadap Masyarakat Pembinaan terhadap masyarakat meliputi pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi

Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa, Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan usaha untuk menggalakkan pembangunan desa dimana untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil. Contoh para pengusaha untuk meningkatkan usahanya diberi pinjaman modal dengan bunga rendah dan bergulir untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat desa. Sebagian besar kegiatan ini telah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan dalam suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Hal di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Adisasmita, 2006) Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam

masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa seperti Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. Peranan dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemerintah desa khususnya pimpinan atau kepala desa. Peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan dan kekayaan di Desa Rancapanggung dengan pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pembinaan di bidang kewiraswastaan.

b. Pengembangan Terhadap Masyarakat

Pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasikan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bias mengoptimalkan keterampilan mereka, yang kedepannya dapat memberikan partisipasinya dalam pembangunan desa. Dimana pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan juga merupakan proses membantu masyarakat dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Pengembangan masyarakat adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan, sebagai proses pengembangan masyarakat mempunyai tiga tahapan yaitu tahap pertama penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam

bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun) dikembangkan, dan proses pengembangan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia agar mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka. Pemerintah Desa sebagai pemimpin penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi baik perubahan yang terjadi di dalam kemasyarakatan maupun perubahan sosial kemasyarakatan untuk itu pemerintah desa selaku pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat dan Desa Rancapanggung menunjukkan bahwa Kepala Desa selaku Pemerintah Desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan karena pemerintah desa dalam hal ini hukum tua sering melibatkan diri atau sering terjun langsung kelapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan nyaitu untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, hukum tua selaku pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat terasa terpanggil untuk berpartisipasi seraca aktif dalam setiap gerak pembangunan yang

dilaksanakan. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan keinginan masyarakat di Desa. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan masyarakat di Desa Rancapanggung yaitu sudah cukup baik, karena masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan ide atau pemikiran tanpa berpartisipasi dalam bentuk dana. Adapun peranan yang diterapkan pemerintah desa Rancapanggung yaitu dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan maupun penyuluhan. Sehingga terbuka pemikirannya apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan desa. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut (Supriatna, 2000), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:

- 1) Membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi), dan
- 3) Membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa dalam mengembangkan masyarakat agar turut berpartisipasi melalui peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan dengan memberikan pelatihan agar pemikirannya terbuka apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan desa khususnya meningkatkan hidup masyarakat itu sendiri.

Sebelum program maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, terlebih dahulu Pemerintah Desa harus menggali potensi yang ada di masyarakat serta mengembangkannya. Oleh karena itu, Peran Pemerintah Desa dalam menggali potensi masyarakat sangatlah penting

dimana masyarakat harus mengasah kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki untuk menjadi nilai tambah dalam menunjang kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Letd. Inf Pur. Nandang selaku Kepala Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin kabupaten Bandung Barat Pemerintah Desa melakukan upaya agar masyarakat desa dapat menggali potensinya dan mengembangkannya dengan memprioritaskan sesuai keahliannya. Dengan melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Desa Rancapanggung memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan harus dilatih dan dibina oleh para ahli dibidang tersebut sehingga masyarakat dapat memiliki pengetahuan khusus. Dengan memilikinya pengetahuan dalam bidang tersebut masyarakat dapat menghasilkan dan meningkatkan taraf ekonomi desa.

Pemerintah desa melaksanakan beberapa kegiatan yang bermanfaat dan berpeluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan memberikan pelatihan tata ariasis, tata boga maupun tata busana sehingga dapat menggali potensi masyarakat desa Rancapanggung serta dapat meningkatkan dari segi keilmuan maupun perekonomian.

Kepala desa selaku pemerintah di desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

Kepala desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aparatur pemerintah di Desa sebagai administrator di bidang

pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang dilaksanakan dalam tingkat desa. Dengan demikian kepala desa selaku pemerintah desa diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan di desa.

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, kepala desa harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, saling keterbukaan dan transparan disamping itu juga pemerintah desa setiap ada kegiatan atau pelaksanaan pembangunan yang ada di desa selalu dilibatkan seluruh komponen masyarakat dan memberikan memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemerintah yang ada di desa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang tersebut di atas, yaitu terutama dalam hal pelaksanaan

kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat mana yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi pegangan mereka misalnya kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat dalam memberikan partisipasinya akan lebih tinggi.

Untuk mencapai tingkat partisipasi dalam pembangunan ekonomi desa yang maksimal dalam hal ini pembangunan di Desa Rancapanggung, maka kepala desa selaku pemerintah desa memerlukan beberapa langkah dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Melembagakan dan memberdayakan fungsi kontrol oleh pihak yang berwenang.
2. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan monitoring.
4. Memperbaiki kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya diarahkan kepada kebijakan riil masyarakat.
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian program yang selaras dengan perkembangan lingkungan.

Peran pemerintah desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi pemerintah juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmoni sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud. Keberhasilan dari peranan yang di terapkan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari namanya rasa kebersamaan antara semua unsur terkait demi mencapai tujuan hidup bersama. Keberhasilan peranan yang di terapkan merupakan hasil bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat itu berjalan dengan baik atau harmonis.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ekonomi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah sejauh mana masyarakat berperan aktif atau dilibatkan dalam proses menyumbangkan pikiran untuk menyusun dan menetapkan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di Desa. Rapat atau musyawarah merupakan salah satu wadah yang sangat penting bagi Kepala Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena di dalam musyawarah tersebut dibahas seluruh permasalahan atau persoalan pemabangunan yang dilaksanakan.

Dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti berperan aktif dan keterlibatan langsung masyarakat penerima program dalam wujud pikiran sebagai informasi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi (2007:27), yaitu partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Hal di atas sejalan denghan hasil wawancara dengan Dekapa Desa Rancapanggung Kecamatan cililin Kabupaten bandung Barat:

“Sejauh ini dapat dikatakan sangat baik, terbukti dengan adanya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan pembinaan”

Begitu juga yang dikatakan ketua LPMD Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat saat dilakukan wawancara :

“partisipasi masyarakat sangat antusias dalam kegiatan pembangunan ekonomi desa di bidang apapun akan tetapi seringsekali terkendala dengan aturan-aturan yang mereka kurang pahami yang mengakibatkan kesalah pahaman antara pemerintah dengan masyarakat”

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dari hasil penelitian terkait peranan pemerintah desa sebagai dinamisator bahwa Kepemimpinan Kepala Desa selama ini masih belum mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan. Kepala desa selama ini jarang ada di tempat. Sehingga, untuk menggerakkan masyarakatnya tanpa ada seorang pemimpin maka pemerintahan desa tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat desa perlu dorongan dari pemimpinnya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi desa. Namun, kalau pemimpinnya sendiri sangat jarang di tempat. Maka, seperti apakah jadinya desa bisa berkembang, sementara pemimpinnya tidak bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Masyarakat pun belum sepenuhnya dilibatkan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. Maka akan terlihat, kurangnya partisipasi dari masyarakat, disebabkan belum adanya pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Desa untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Rancapanggung.

Peranan pemerintah desa sebagai katalisator untuk Urusan Pemerintahan Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tidak bisa terkendali dan tidak dipertanggungjawabkan dengan tugas yang telah ditentukan. Kepala desa belum mampu mengkoordinir masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di desa. Kepala Desa belum bisa menunjukkan peranannya kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi di Desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan ekonomi di Desa. Kalau saja masyarakat juga di ikut sertakan maka, proses kegiatan pembangunan ekonomi akan cepat dan mudah bisa terselesaikan dengan baik. Peranan pemerintah desa sebagai pelopor untuk pemerintah desa belum sepenuhnya menangani masalah pembangunan ekonomi yang ada di desa.

Program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tidak selalu mendapat dukungan yang berimbang pada terserapnya partisipasi masyarakat. Hal ini dipengaruhi kondisi, karakteristik, dan sosial budaya atau adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, kebutuhan akan format dalam komunikasi pembangunan yang tepat jadi sangat relevan. Pembangunan dibidang fisik terutama memang perlu diprioritaskan karena pembangunan bidang fisik ini lebih memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan yang dimaksudkan seperti gotong-royong membersihkan lingkungan, perbaikan posyandu, dan memperbaiki sarana dan prasarana umum. Sesuai dengan pendapat Slamet yang dikutip oleh (Suryono, 2001) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Dimana diketahui bahwa melaksanakan kegiatan bergotong-royong dari pembangunan tersebut masyarakat akan menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan, Pengawasan serta Evaluasi Pembangunan ekonomi

Berkenaan dengan uraian tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi pembangunan, maka masyarakat memiliki peran untuk memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik dengan cara menggunakan, menjaga serta merawat hasil pembangunan tersebut, mengawasi setiap pembangunan yang sedang berjalan serta mengevaluasi setiap pembangunan yang sedang berjalan maupun pembangunan yang telah berhasil. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi pembangunan merupakan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Riwo Kaho (2005:127) yang dimana terdapat empat jenjang partisipasi yaitu mulai dari pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai.

Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan yang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Rancapanggung tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan untuk pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan begitu penting sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis pemerintah dan swasta posisi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan tetapi masyarakat berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Desa harus benar-benar dapat mengsosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terrealisasi dengan sebaik-baiknya sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan disatu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan di lain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan baik dalam persoalan waktu ataupun pikiran keinginan untuk menciptakan kordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk terlihat kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin sehingga dapat menumbuhkan

partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena terasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang di perlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat disini yaitu berasal dari individu itu sendiri yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat sendiri serta masalah yang berasal dari luar diri masyarakat. Banyak pula Kepala Desa selaku pemeritah di desa tersebut banyaknya kurang memahami asirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan karna dari segala bentuk pembangunan yang di lakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan melalui aspirasi yang di sampaikan atau di berikan oleh rakyat atau masyarakat bila dalam proses pelaksanaannya di lakukan secara terpadu atau sesuai dengan harapan maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam melaksanakan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat. Mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan harus diakui juga bahwa pemerintah desa tidak akan sempurna apabila ia tidak memperhatikan kekurangan ataupun kendala-kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi langsung oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan.

Kendala-kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakatan desa Rancapanggung diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari atasan pemerintahan desa

2. Tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga negara karna dengan pendidikan warga negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahwa hidup mereka yang lebih baik. Namun apabila melihat tinggkat pendidikan yang ada di desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat khususnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang cukup lumayan karna kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMP,SMA.

Mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam program-program pembangunan di Desa Rancapanggung bukan hal yang mudah hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa program-program pembangunan di Desa Rancapanggung pekerjaan pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program pembangunan tersebut. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan harus diberi upah.

Masyarakat Desa Rancapanggung itumanya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya di sampaikan kepada pemimpin mereka nyaitu Kepala Desa untuk diperjuangkan pada tingkat Kecamatan maupun Kabupaten keinginan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri akan tetapi juga merupakan keinginan masyarakat selain berpatisifasi dalam bentuk pemikiran yang disampaikan sebagai masukan sebagian masyarakat

juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mempermudah jalannya kegiatan yang dilaksanakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan kebijakan yang diambil bersama. Kurangnya koordinasi yang ada antara tingkat instansi di pemerintahan merupakan hambatan eksternal berikutnya, ketidaksamaan antara pihak desa dengan pihak kabupaten merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung.

Hal ini sesuai dengan teori Slamet (1993). Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu hambatan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan ekonomi kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang memiliki terhadap hasil pembangunan.

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yaitu didukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang siap dikelola, keadaan wilayah cukup luas serta tersedianya anggaran untuk pembangunan yang dialokasikan melalui ADD yang telah ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung. Kebijakan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan merupakan faktor pendukung bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. sedangkan dalam segi ekonomi masyarakat Desa Rancapanggung memiliki mata pencaharian sebagai

petani dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi dan ada juga beberapa mengharuskan mereka agar bekerja diluar desa seperti warga yang tidak sempat berpartisipasi karna masih banyak warga yang tidak bekerja dalam beberapa hari maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka dan karena yang lain belum mempunyai wilayah sendiri mengharuskan mereka untuk keluar daerah untuk bekerja pada orang lain.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung masih belum optimal dikarenakan kurangnya Kepala Desa dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung.

Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang ditemui yaitu masalah yang menyangkut rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Kemudian kurangnya sosialisasi dari instansi-instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi. Sedangkan Faktor Pendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yaitu adanya anggaran untuk pembangunan yang telah dialokasikan melalui ADD Desa Rancapanggung dan keadaan wilayah yang cukup luas serta potensi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain yang siap dikelola pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo., 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsiyah. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Davis, Keith. 2010. *Organizational Behavior –Human Behavior at Work 13th Edition*. New Delhi: Mcgraw Hill Company.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*.PT. Rineka Cipt. Jakarta
- Notoatmodjo .(2005). *Metode penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____.(2010). *Metode penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduwan. (2009). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: ALFABETA.
- Siti Irene A Stuti D., 2011. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Ithaka. Cornel University.
- Soemodiningrat, Gunawan. (2009). *Membangun Perekonomian Rakyat*.Yogyakarta: IDEA dan Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Tjahja Supriatna. (2000). *Prinsip –Prinsip Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta. Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005.*Manajemen Publik*. Gramedia Widia.Jakarta.
- Umboh, Fredriek Anderson. 2004. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa*. Tesis. Pascasarjana, IPB
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Uphoff dan Cohen. 2007. *Raising Factor Productivity in Irrigated Rice Production : Opportunities with The System of Rice Intensification*.DISIMP.

Wicaksono, 2010. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Kasus: Sistem Polder Banger Kelurahan Muktiharjo, Kota Semarang*. Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wadah dan penyalur aspirasi masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Data profil desa Rancapanggung 2017